

LITERATURE AS A REPRESENTATION OF THE PROBLEMS OF FREEDOM IN PUBLIC SPACE: A STUDY OF

NAJIB MAHFUZ'S NOVEL AL-KARNAK

Amiroh Nichayatun Munir Azizah¹, Sukron Kamil²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email:¹niaazizah9@gmail.com, ²syukronkamil@uinjkt.ac.id,

(Submitted: 19-12-2021, Accepted: 28-02-2022)

ملخص

هذه المقالة تهدف إلى الكشف عن كيفية تصوير استغلال حرية الفضاء العام في رواية الكرنك. تشمل هذه المقالة أنواع البحوث النوعية الوصفية. ثم استخدم الباحثون منح حرية المجتمع مع تحليل النص. استخدم الباحثون مصادر البيانات الأولية برواية الكرنك لنجيب محفوظ. وفي الوقت نفسه فإن المصادر الثانوية في هذا البحث هي العناصر الداخلية في الأعمال الأدبية والكتب، والمقالات، والمجلات، والإنترنت ومعلومات البيانات التي لا تزال ذات صلة بموضوع المقالة. نتيجة هذه المقالة أن هناك المشاكل حول حرية الفضاء العام في خضم السياسات القمعية التي تشمل: (1) حدود المرأة في التعبير عن الرأي، (2) إسكات المواطنين الذين اختلفوا مع الحكومة، (3) الأزمة عن ثقة الجمهور في الحكومة. إن وجود رواية الكرنك في هذا المجال معناه يمثل انتقاداً لرئيس جمال عبد الناصر. فإن نجيب محفوظ قد انتقد جمال عبد الناصر الذي ليس له امكانية على تحقيق الديمقراطية والحرية للشعب وفقاً لوعوده السياسية في بناء العدالة الاجتماعية من خلال حرية الدينية، وحرية الصحافة وحرية الإجتماعية. مع أن هذه الرواية أيضاً أظهرت انكسار حدود المجتمع أمام سيطرة الحكومة، على الرغم من التزام حكومة جمال عبد الناصر في مجال الديمقراطية..

الكلمات المفتاحية : الحرية؛ منطقة العامة؛ الكرنك؛ نجيب محفوظ.

Abstract

The purpose of this research is to paint a picture of the novel al-exploitation Karnak's of public sphere freedom.. This study uses qualitative methods that produce descriptive data. Then the researcher used the freedom of the public sphere approach by analyzing the text. The primary source used by the researcher is the novel al-Karnak by Najib Mahfuz. Meanwhile, secondary sources in this research are intrinsic elements in literary works, books, papers, journals, the internet, or information and data that are related and still relevant to the object of study. This research shows that there are problems with the freedom of the public sphere, including: (1) the limitations of women in expressing opinions; (2) the silencing of citizens who disagree with the government; and (3) a crisis of public trust in the government. The presence of the novel al-Karnak implicitly represents a criticism of the president of Jamal 'Abd al-Nasjir. Najib Mahfuz criticized Nasir as a president who was unable to realize democracy and freedom for the people according to his political promises of building social justice through guarantees of freedom of religion, freedom of the press, association, and opinion. This novel also does not describe the slightest bit of control from the people, even though Nasjir's administration has adhered to the principle of democracy.

Keywords: Freedom; Public Sphere; al-Karnak; Najib Mahfuz

Pengutipan: Munir Azizah, A. N., & Kamil, S. (2022). Sastra Sebagai Representasi Problematika Kebebasan Ruang Publik: Kajian Novel Al-Karnak Karya Najib Mahfuz / Literature as a Representation of the Problems of Freedom in Public Space: A Study Of Najib Mahfuz's Novel Al-Karnak. Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, 8(1). <https://doi.org/10.24252/diwan.v8i1.25603>.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang sastra, selama ini masih saja muncul persepsi bahwa sastra disesaki dengan pendekatan kultural atau karya sastra merupakan satu produk budaya tersendiri dalam masyarakat. Sastra tidak memiliki relasi, baik dengan ekonomi, sosial dan politik. Pada pemahaman pendekatan kultural, sastra merupakan suatu areal yang terpisah, terutama dari wilayah politik.¹ Hal tersebut disebabkan karena paham estetika yang mendominasi masih kental. Sebagaimana pendapat Kleden yang mengatakan bahwasanya estetika dalam sebuah karya sastra merupakan faktor yang seluruhnya bersifat otonom, tidak tunduk pada aspek luar.² Maka, menurut hemat penulis, jika para pengkaji sastra hanya fokus pada sisi keindahan karya semata, tidak menjadi heran apabila sastra dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang sempit. Sebagaimana pendapat pendapat Sukron Kamil, adanya interdisipliner antara sastra dengan disiplin ilmu lain akan membuat para pengkaji sastra tidak hanya mengkaji hasil khayalan sastrawan, tetapi juga mengkaji problematika kemanusiaan lainnya.³

Pada hakikatnya, sebuah karya sastra merupakan representasi sosial masyarakat tempat pengarang lahir dan tumbuh, sehingga apa yang mereka lihat, rasakan mampu mengilhami menjadi sebuah tulisan yang sangat estetik. Dalam kehidupan sosial, masyarakat harus berhadapan dengan berbagai macam problematika, baik disebabkan oleh ideologi, kekuasaan maupun politik. Maka, karya sastra hadir sebagai alat kontrol terhadap penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, seperti agama, ideologi, ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan politik.⁴ Interdisipliner antara ilmu sastra dengan beberapa disiplin ilmu lainnya akan menghasilkan beberapa teori, sehingga teori apa saja dapat dimanfaatkan dalam penelitian sastra sesuai dengan objek dan tujuan dari penelitian.

Dalam sastra Arab, di antara karya sastra yang menarik dan layak dikaji untuk melihat sebuah sastra sebagai representasi problematika kebebasan ruang publik adalah novel *al-Karnak* karya Najīb Maḥfūz. Novel-novelnya pun sudah banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di belahan dunia, salah satunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tulisan dan karya yang ditulis oleh Najīb Maḥfūz banyak menggambarkan tentang kondisi sosial politik masyarakatnya khususnya Mesir. Bahkan Najīb Maḥfūz pernah mengatakan yang dikutip oleh Jamāl al-Ghīṭānī dalam bukunya yang berjudul *Najīb Maḥfūz Yatāzakkār*,

“Pada setiap tulisanku, para penikmat karya sastra akan menemukan problematika politik. Pembaca akan sangat sangat jarang menemukan persoalan cinta dan lain

¹ Soediro Satoto dan Zainuddin Fanani (ed), *Sastra: Ideologi, Politik dan Kekuasaan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. 125-126.

² Yoseph Yapi Taum, *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2015), h. 2.

³ Sukron Kamil, *Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 71.

⁴ Soediro Satoto dan Zainuddin Fanani (ed), *Sastra: Ideologi, Politik dan Kekuasaan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. v.

sebagainya kecuali masalah sosial politik masyarakat, semua masalah politik akan pembaca dapati pada setiap karyaku, sebab itu adalah inti pemikiranku.”⁵

Apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir merupakan bagian dari Afrika Utara.⁶ Mesir modern sering mengalami pergulatan politik yang berkepanjangan dan bertahap. Salah satunya adalah Perang Enam Hari pada tahun 1967 M. Ambisi politik nasionalisme Arab di bawah pemerintahan Nāṣir, kudeta dan juga sengketa dengan Israel di Suriah menjadi beberapa penyebab terjadinya perang tersebut. Perang tersebut dimulai dengan serangan Mesir dan koalisi Arab, seperti Yordania, Suriah dan Lebanon ke wilayah Israel. Akibat kemenangan Israel mengalahkan negara-negara Arab, Israel berhasil menguasai wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai Mesir, Suriah dan Yordania, seperti Jalur Gaza, Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi. Najīb Maḥfūz sebagai sastrawan tentu merasakan denyut perubahan sosial yang cepat ini dan memiliki kepekaan yang lebih tinggi dibanding manusia pada umumnya.⁷

Menurut tinjauan historis, kala itu Mesir berada di bawah naungan Gamāl Abd al-Nāṣir. Seorang diktator bertopeng nasionalis yang menggaungkan pan Arabisme. Selain itu, sistem pemerintahan Mesir beralih dari Monarki menjadi presidential. Meski pemerintahan Nāṣir membawa banyak kemajuan bagi Mesir terutama di bidang ekonomi, namun rezim Nāṣir ini mampu membuat perpecahan diantara masyarakatnya. Fenomena ini mencapai puncaknya saat Nāṣir menaruh perhatian besar pada bendungan Aswan. Hal ini semakin meyakinkan peneliti bahwa Najīb Maḥfūz jelas melakukan pemberontakan melalui karyanya.

Dalam novel *al-Karnak*, terdapat beberapa tokoh yang mendominasi, di antaranya sosok Hilmī Ḥamāda, Zainab Diyāb dan Ismāīl al-Shaīkh yang menjadi potret penderitaan masyarakat Mesir kala itu. Mereka bertiga merupakan aktivis yang sangat memikirkan kondisi masyarakatnya sehingga ketiganya setuju terhadap revolusi. Hidup mereka diberangus oleh pemerintah Mesir karena berbeda paham dan keyakinan politik. Meskipun dalam novel karya Najīb Maḥfūz ini lebih banyak berbincang tentang politik, tetapi novel ini juga diselipkan bumbu-bumbu cinta agar cerita lebih menarik di kalangan pembaca.

Novel ini merepresentasikan Kafe Karnak sebagai ruang publik atau tempat berkumpul para aktivis untuk memperbincangkan berbagai permasalahan realitas politik yang terjadi di Mesir waktu itu dan juga berbagai ideologi yang berseberangan dengan pemerintah. Hal ini memunculkan isyarat kaum oposisi untuk membisikkan bahwa pandangan ekstrim kiri ataupun sejenisnya harus diwaspadai dan jika perlu dilakukan penyiksaan. Sosok pemuda, seperti Hilmī Ḥamāda, Zainab Diyāb dan Ismāīl al-Shaīkh ini dengan permasalahan-permasalahannya masing-masing yang kemudian menjadi gambaran akan realita sosial dan terjadinya berbagai intimidasi.⁸

⁵Jamāl al-Ghīṭān, *Najīb Maḥfūz Yatadhakkār* (Beirut: Dār al-Maṣīrah, 1980), h. 78.

⁶Philip K Hitti, *Sejarah Ringkas Dunia Arab* (Yogyakarta: Iqra' Pustaka, 2001), h. 237.

⁷ Begitu sensitifnya, sastrawan tidak memerlukan lagi seseorang yang mendorongnya untuk memperhatikan masyarakatnya. Lihat dalam Mahmud Taymur, *Ittijāhāt al-Adab fī al-Sinīn al-Mi'ah al-Akhīrah* (Kairo: al-Namudzajiyah, 1970), h. 189.

⁸Najīb Maḥfūz, *al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006).

Akibat sikap otoriter pemerintah ini lah yang menjadikan pemuda-pemuda Mesir kehilangan kebebasan khususnya pada ranah publik, seperti kebebasan untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu indikator dalam kajian ruang publik. Dalam kajian ruang publik kebebasan berekspresi menjadi tolok ukur konsep negara demokrasi, atau kebebasan adalah salah satu unsur dalam demokrasi.⁹ Jadi, kebebasan itu ketika seseorang ingin bisa melakukan apa yang ingin seseorang itu lakukan.

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana potret problematika kebebasan ruang publik dalam sebuah karya sastra. Sebab, seiring perkembangan zaman, problematika terkait kebebasan tidak terbatas hanya dikaji oleh para filsuf atau politikus semata, tetapi beberapa sastrawan juga menuangkan problematika kebebasan ruang publik tersebut ke dalam karya sastranya sebagai refleksi dari apa yang ia lihat dan rasakan di sekitarnya. Ini lah yang digagas oleh sastrawan Mesir, Najīb Maḥfūz, salah satunya dalam karyanya yang berjudul *al-Karnak*.

Berbagai problematika kebebasan dalam novel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori ruang publik yang dibicarakan oleh Habermas yang mengarah pada ruang publik yang bebas berdiskusi dan saling berpendapat secara komunikatif politis terkait isu-isu negara, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya batas stratifikasi sosial.¹⁰ Apa yang dikemukakan oleh Habermas masih belum terealisasikan di Negara Mesir ketika masa pemerintahan Gamāl Abd al-Nāṣir. Kebebasan ruang publik saat itu seakan-akan belum nampak yang berakibat pada pembungkaman terhadap warga yang tidak selaras dengan pemerintah.

Dalam mengkaji terhadap kajian terdahulu, peneliti memetakan pada dua aspek, yaitu objek formal dan objek material. Apabila dilihat dari objek material, maka penelitian tentang novel *al-Karnak* sudah dilakukan oleh Fadlun Suweleh dengan judul “*Karakteristik Heterotopia Ruang Kafe dalam Novel al-Karnak Karya Najīb Maḥfūdz: Analisis Other Space Michel Foucault*”. Di dalam penelitian tersebut, Fadlun fokus pada karakteristik heterotopia ruang kafe Karnak sebagai latar tempat novel. Ruang kafe Karnak tersebut menghasilkan ruang lain, diantaranya sebagai ruang ilusi, ruang kompensasi, ruang eksklusif, ruang purifikasi, ruang kompromi dan ruang publik.¹¹ Kemudian penelitian oleh Mochtar Dwi Purnomo dengan judul “*Pandangan Dunia dalam Novel al-Karnak Karya Najīb Maḥfūdz: Analisis Strukturalisme Genetik*”. Penelitian Mochtar fokus pada pandangan dunia yang direpresentasikan dalam novel *al-Karnak* adalah pandangan dunia sosialisme demokrat.¹² Setelah melakukan kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap politik represif dan problematika kebebasan ruang publik dalam novel *al-Karnak* mempunyai nilai kebaruan. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya dengan objek material yang sama, tetapi sama sekali tidak

⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), h. 110.

¹⁰ Embu Henriques and Andina Dwifatma, ‘Fungsi Politik Ruang Publik Pada Masa Orde Baru, Reformasi, Hingga Era Digital’ ..., h. 5.

¹¹ Fadlun Suweleh, *Karakteristik Heterotopia Ruang Kafe dalam Novel al-Karnak Karya Najīb Maḥfūdz: Analisis Other Space Michel Foucault*. Yogyakarta: Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2020.

¹² Mochtar Dwi Purnomo, *Pandangan Dunia dalam Novel al-Karnak Karya Najīb Maḥfūdz: Analisis Strukturalisme Genetik*, Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2016.

membahas bagaimana di negara Mesir khususnya pasca Perang Enam Hari nampak berbagai problematika kebebasan ruang publik di tengah-tengah politik represif yang menonjol, direpresentasikan oleh Maḥfūz ke dalam karyanya *al-Karnak*.

Berdasarkan pemaparan di atas, baik latar belakang maupun kajian pustaka, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk merepresentasikan eksploitasi kebebasan ruang publik di tengah politik represif dengan perspektif ruang publik Jurgen Habermas.

METODOLOGI

Pada metodologi penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang selayaknya dilakukan oleh seorang peneliti, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut semakin memiliki arah yang jelas dan tentunya lebih dapat dipahami tujuan dan maksud dari sebuah penelitian. Adapun beberapa langkah dalam penelitian ini, diantaranya seperti: penentuan terhadap jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik dalam menganalisis data.

Jenis penelitian dalam mengkaji Sastra sebagai Representasi Problematika Kebebasan Ruang Publik: Kajian Novel *al-Karnak* karya Najīb Maḥfūz adalah penelitian kualitatif.¹³ Artinya, dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan secara induktif, sehingga fokus penelitian ini lebih terarah agar dapat memperoleh makna dibalik objek material yang diteliti, baik berupa kata, kalimat atau paragraf dari pada produk sebuah sumber data. Langkah penelitian kualitatif ini juga akan menghasilkan data deskriptif, maksudnya adalah bahwa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.¹⁴ Tujuan dari data deskriptif ini untuk memahami objek material, berupa kata, kalimat atau paragraf secara keseluruhan, kemudian menganalisis setiap data tersebut kemudian merepresentasikannya dalam sebuah penjelasan, sehingga penelitian akan semakin jelas.

Adapun sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber studi kepustakaan atau *library research*, yaitu novel sebagai sebuah teks karya sastra sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membagi 2 kategori sumber data; 1) Sumber data primer atau bisa disebut juga dengan objek material, yaitu objek yang menjadi kajian lapangan.¹⁵ Pada penelitian ini sumber data primer yaitu novel *al-Karnak* yang ditulis oleh sastrawan Mesir Najīb Maḥfūz, 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori atau parameter yang menjadi rujukan.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan kebebasan, ruang publik, kemudian makalah, majalah, jurnal-jurnal dan juga internet yang berkaitan dengan kebebasan, ruang publik, politik serta teori yang peneliti gunakan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui pembacaan dan penelaahan terhadap novel *al-Karnak* karya Najīb Maḥfūz sebagai sumber primernya. *Pertama*, membaca

¹³Bruce L Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (United State of America: Pearson Education, 2001), h. 3.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 6

¹⁵Faruk, *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 23.

¹⁶Siswantoro. *Metode Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.

dan mengumpulkan data dari teks lain yang valid dengan penelitian ini untuk memperoleh gambaran problematika kebebasan ruang publik dalam novel al-Karnak. *Kedua*, data-data teks tersebut kemudian diidentifikasi sesuai data yang dibutuhkan, objektif dan otentik. *Ketiga*, mengklasifikasi data, yaitu dengan pengelompokan data sesuai dengan kelompoknya, kemudian dilakukan koding atau mencatat *script* secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Interpretasi data merupakan acuan dalam penarikan kesimpulan. Acuan ini berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum ke khusus. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh representasi yang jelas tentang objek penelitian secara objektif.¹⁷

Analisis data dalam suatu penelitian adalah sekumpulan cara untuk mencari hubungan antar data, baik berupa hubungan genetik, hubungan fungsi, disposisi, intensional, kausal maupun yang lainnya.¹⁸ Perlu diingat bahwa keberhasilan suatu penelitian ditentukan melalui bagaimana suatu analisis dilakukan, dalam hal ini operasionalisasi teori, metode, teknik sebagai alat dan data-data formal sebagai objek kajian.¹⁹ Dalam melakukan analisis data, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, diantara: 1) Melakukan identifikasi data, 2) klasifikasi data, dan 3) interpretasi data.

TEORI RUANG PUBLIK JURGEN HABERMAS

Gagasan ruang publik secara teoritis dirintis oleh Habermas melalui kajiannya ketika menelaah kemunculan ruang-ruang diskusi di kafe-kafe yang ada di Eropa pada abad pertengahan. Habermas menjelaskan bahwa kemunculan ruang publik tidak dapat dilepaskan dari adanya problematika kekuasaan yang dibangun oleh kaum borjuis kala itu. Tekanan politik dari pers dan media dan berkembangnya kapitalisme pada abad ke-18 turut memberikan pengaruh dalam mendominasi perdebatan kritis atas suatu permasalahan sosial di dalam ruang publik. Bahkan abad ke-18 terjadi perbanyakan institusi-institusi masyarakat Eropa yang praktis menghasilkan banyak 'publik' dalam pengertian yang terkait dengan masyarakat warga. Misalnya, publik dalam konser, publik dalam teater, publik pembaca koran dan lain sebagainya. Semua ini mengacu pada bentuk-bentuk baru kepublikan yang tidak terdapat di zaman-zaman sebelumnya, yakni publik yang memiliki kemampuan untuk memberi penilaian estetis, moral, dan rasional atas sesuatu.²⁰

Pada sisi lain, kemunculan ruang publik juga disebabkan transisi kekuasaan dari runtuhnya kuasa feodal ke dalam kuasa kapitalis. Melalui hal itu, ruang publik mulai memainkan fungsi sentralnya secara politis menjadi sebuah ruang terbuka bagi publik dan negara yang digunakan untuk mendiskusikan segala kepentingan publik. Ruang ini juga digunakan sebagai wadah

¹⁷Rachmatullah, *Kritik atas Monarki Islam: Kajian Novel Hatif min al-Andalus Karya 'Ali al-Jarim*, Tesis Konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sudah diterbitkan di Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019), h. 30.

¹⁸Mohammad Anwar Sy'aruddin, *Sastra Islam dan Modernitas dalam Novek Api Tauhid el-Shirazy*. Tesis Konsentrasi Bahasa dan Sastra Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sudah diterbitkan di Ciputat: Penerbit Cinta Buku Media, 2016), h. 29.

¹⁹Nyoman Kutha Ratna, *Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 34.

²⁰Holscher, Lucin, "Offenlichkeit", dalam : Brunner, Otto et.al. (ed), *Geschichtliche Grundgriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen in Deutschland*, (Klett-Cotta: Stuttgart. 1978), h. 323.

untuk mendebat negara terhadap isu-isu publik dan privat seperti pertukaran sosial dan komoditas,²¹ yang menggabungkan masyarakat sipil dengan negara dengan berfokus pada gagasan tentang kepentingan publik sebagai perbedaan dari kepentingan pribadi. Bagaimanapun, hal itu jelas berakar dalam masyarakat sipil dan memang jenis privasi khusus yang diizinkan dan dihargai. Habermas menjelaskan mengenai ruang publik sebagai ranah perkumpulan masyarakat sebagai bagian dari publik

“The bourgeois public sphere may be conceived above all as the sphere of private people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor.”²²

Ruang publik juga bukanlah ranah yang para pelakunya adalah pejabat atau pegawai pemerintah, melainkan pelakunya semua warga masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun pelaku bisnis ataupun pelajar biasa. Ruang publik adalah ranah maupun aset, barang, jasa, ruang, atau gugus infrastruktur lain yang kinerjanya menjadi penyangga watak sosial suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berevolusi dari sekedar kerumunan (*crowd*) menjadi sebuah komunitas (*community*). Dengan demikian bukan hanya taman kota atau lingkungan hidup, melainkan juga acara-acara televisi swasta dan juga dewasa ini media sosial merupakan ‘ruang publik.’²³ Menurut Habermas, masyarakat sipil juga dikatakan sebagai asosiasi dan organisasi non-pemerintah yang menyaring masalah-masalah kemasyarakatan dan menyebarkannya ke masyarakat umum yang lebih luas. Ini sangat mirip dengan kelompok afinitas Durkheim seperti organisasi profesional atau serikat buruh. Habermas telah memperluas jenis mekanisme dari daftar Durkheim yang agak formal untuk memasukkan lebih banyak asosiasi sementara. Agar mekanisme ini berhasil, Habermas berpendapat bahwa kebebasan berekspresi harus berkembang. Dari sudut pandang sosiologis, kebebasan berbicara dalam segala bentuknya merupakan fungsi masyarakat modern.²⁴

Memang, ranah publik dari zaman keemasan Habermas menjadi ranah publik borjuis hanya dengan mengusir pengrajin radikal dan lainnya dan menetapkan batasan kelas dan apa yang dianggap sebagai opini terhormat. Demikian pula, hak perempuan untuk berbicara di depan umum sering kali diperdebatkan seperti halnya hak mereka untuk memilih. Pengecualian dari

²¹Erisandi Arditama, ‘Mengkaji Ruang Publik Dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya’, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.1 (2016), 69 <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181>, h. 72.

²²Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry a Category of Bourgeois Society* (United States of America: MIT Press, 1989) [https://doi.org/10.1016/S0140-3664\(99\)00082-I](https://doi.org/10.1016/S0140-3664(99)00082-I), h. 27.

²³Budi Hardiman (ed), *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), h. 376-377

²⁴Harry Melkonian, *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression* (New York: Cambria Press, 2012), h. 49.

informasi dan suara sering kali menjadi dasar praktik kehidupan publik sebagaimana keterbukaan pada landasan normatifnya. Namun selama abad ke-19 dan ke-20, kehidupan publik di berbagai negara semakin terbuka bagi warga negara lebih dari sekadar pemilik properti, wanita, pekerja, ras dan etnis minoritas.²⁵

Pembahasan mengenai ruang publik yang dibicarakan oleh Habermas cenderung mengarah pada ruang publik yang bebas berdiskusi dan saling berpendapat secara komunikatif politis terkait isu-isu negara, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya batas stratifikasi sosial. Artinya, meskipun secara konstruksi bahwa ruang publik ini dipayungi oleh kaum borjuis, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat umum untuk ikut serta dalam ruang publik ini. Habermas mengkategorikan ruang publik semacam ini dengan istilah ruang publik politik.²⁶

PEMBAHASAN

Keterbatasan Perempuan dalam Menyatakan Aspirasi

Seiring perkembangan zaman, problematika mengenai kebebasan tidak semata menjadi pembahasan para filsuf, namun juga dibahas oleh ahli politik, sosial dan ekonomi. Bahkan, beberapa sastrawan juga menuangkan problematika kebebasan dalam karya sastra sebagai refleksi dari apa yang ia lihat di sekitar lingkungan hidupnya. Dalam novel *al-Karnak*, Mahfuz menggambarkan adanya keterbatasan perempuan dalam menyatakan pendapat di hadapan publik. Hal demikian tentu tidak selaras dengan pendapat Habermas yang mengatakan bahwa kebebasan ruang publik harus terbuka bagi publik (tanpa memandang laki-laki maupun perempuan) untuk mendiskusikan segala kepentingan masyarakat. Ruang ini juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendebat dan mengkritisi negara dari berbagai macam penyelewengan dan otoriter pemerintah terhadap masyarakat.

Dalam novel *al-Karnak*, Mahfuz menggambarkan adanya ketidakbebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat dari kalangan perempuan. Sebagaimana telah kita pahami bahwa kawasan Timur Tengah memiliki tingkat kesetaraan gender paling rendah dalam kawasan dunia, salah satunya adalah negara Mesir sebagai latar tempat novel tersebut diceritakan. Salah satu sebab rendahnya kesetaraan gender di Timur Tengah karena masih adanya persepsi yang menganggap bahwa perempuan memang berada di kelas kedua, juga didukung oleh

²⁵Craig Calhoun, 'The Facets of the Public Sphere: Dewey, Arendt, Habermas', in *Institutional Change in the Public Sphere*, ed. by Fredrik Engelstad and others (De Gruyter, 2017), h. 27.

²⁶Embu Henriques and Andina Dwifatma, 'Fungsi Politik Ruang Publik Pada Masa Orde Baru, Reformasi, Hingga Era Digital', *Jurnal Interact*, 4.1 (2015) <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/fiabikom/article/view/726>, h. 3.

seluruh sistem sosial dan kebudayaan yang menentang adanya emansipasi pada perempuan dan juga kesetaraan gender.²⁷

Dahulu, politik merupakan wilayah yang relatif steril dari perempuan, karena ranah politik merupakan dunia para laki-laki.²⁸ Begitu pula dengan gambaran terhadap rendahnya kebebasan perempuan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik merupakan sebuah pelanggaran hak-hak demokratis fundamental perempuan. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung selama ini membuat perempuan harus lebih berjuang untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan, tidak hanya pada ranah politik saja.

Adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam ranah publik adalah sebuah rintangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang publik guna membicarakan terkait isu-isu negara. Adanya pembatasan terhadap hak-hak politik perempuan disebabkan laki-laki melakukan kontrol terhadap keseluruhan hidup perempuan dan juga menggunakan kontrol secara individual. Pembatasan-pembatasan terhadap perempuan dalam ranah publik ini muncul sebagai akibat dari interpretasi terhadap teks-teks agama yang dirasa bias gender.²⁹ Adanya pemaksaan perempuan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik biasanya akan berakibat pada kekerasan terhadap perempuan tersebut, terlebih jika dalam negaranya menganut sistem politik yang represif.

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan banyak disebabkan karena adanya budaya laki-laki yang lebih mendominasi. Dalam dominasi ini kekerasan tersebut sering dipakai laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk mencegah perbuatan mendatangi yang dianggap membahayakan dan untuk menyatakan rasa kurang puas terhadap sesuatu. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi adanya sistem patriarki. Di antara bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sudah lama terjadi dan sering dialami banyak perempuan di berbagai negara, seperti serangan seksual, perdagangan wanita, pemaksaan untuk menjadi pelacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Adapun novel ini sangat terlihat dengan jelas bahwa terdapat kekerasan terhadap perempuan sebagaimana kutipan teks berikut:

وسمعت أقداما تقترب حتى طوقتني تماما، ما عسى أن أقول؟!
قرر أن يرى مشهدا مثيرا وممتعا وخارقا للمألوف.

²⁷Maryam Jamilah, *Ketidaksetaraan Gender Perempuan Mesir di Bidang Politik Pasca Arab Spring 2011*. Jurnal Buana Gender, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 150.

²⁸Nur Mohammad Kasim, *Keterlibatan Perempuan dalam Dinamika Hukum di Indonesia*. Jurnal MUSAWA, Vol. 6, No. 2, Desember 2014, h. 347.

²⁹Sri Wijaya, *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*. AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1, April 2016, h. 10.

“Aku mendengar langkah kaki mendekat. Mereka kian mendekat, hingga mereka terlihat mengitariku. Apa yang bisa kukatakan?”

“Pada batas ini ia putuskan membuat tontonan merangsang sekaligus menciptakan gairah untuk dirinya, sesuatu yang benar-benar melampaui batas kewajaran dan kesopanan.”

“Hingga tak ada sehelai benang pun tersisa. Ya, tepat di hadapannya!”

Dari kutipan teks di atas memberikan gambaran bahwa adanya sikap otoriter penguasa terhadap perempuan yang dialami oleh tokoh pemuda bernama Zainab Diyāb. Zainab dalam novel ini direpresentasikan sebagai tokoh yang mengalami serangan seksual dari penguasa yang kejam bernama Khālid Ṣafwān dan dipertontonkan di depan khalayak umum yaitu para polisi rahasia. Kejadian ini disebabkan karena Zainab merupakan kekasih Ismā‘īl al-Shaīkh yang dituduh oleh Khālid Ṣafwān sebagai seorang komunis karena kedekatannya dengan Hilmī Hamāda yang ternyata anggota dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada kenyataannya Zainab dan Ismā‘īl merupakan tokoh yang sangat mendukung revolusi Mesir bahkan selalu menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan “kami anak revolusioner, kami lahir dari revolusioner” dan keduanya bukan seorang komunis.

Hari demi hari siksaan berlangsung, hidup, tidur, makan serta melakukan seluruh kegiatan fisik di satu tempat yaitu penjara, menjadi sasaran penghinaan sekaligus siksaan paling kejam, penderitaan yang hanya seorang wanita saja sanggup benar-benar mengerti.³¹ Kekerasan pada perempuan akan berakibat pada penderitaan perempuan baik secara seksual, mental maupun fisik, termasuk ancaman pemaksaan dan perampasan kebebasan perempuan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi.³²

Akibat dari ini, Zainab sangat terpuruk, ia sangat merasa bahwa ada sesuatu yang sudah hilang darinya. Sesuatu yang tentunya tidak dapat ditebus dengan apa pun, hingga ia menganggap bahwa dirinya merupakan wanita yang sangat rendah. Hal ini berakibat pada penderitaan secara mental pada diri Zainab, ia akan bisa menerima segala risiko kecuali jika kekasihnya, Ismā‘īl menganggapnya sebagai seorang wanita hina. Maka dari itu Zainab melakukan cara yang sangat diluar nalar, yaitu memberitahu Ismā‘īl perihal ini dengan cara yang sangat alami, yaitu ia serahkan tubuhnya pada Ismā‘īl .

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah rintangan akan pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan pada perempuan, menghalangi perempuan dalam ikut berkontribusi penuh dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran akan hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan merupakan hak perempuan yang sudah melekat sejak lahir baik karena

³⁰Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 67.

³¹Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 66.

³²Deklarasi PBB tentang Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1/1983. Dalam Dini Zulfiani dkk, *Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Administrative Reform, Vol. 6, No. 3, September 2018, h. 144.

ia sebagai manusia atau sebagai perempuan. Dalam praktiknya, hak asasi perempuan banyak ditemukan dalam khazanah hukum, mulai dari masalah hak apa saja yang diakui, penjaminan hak dan bagaimana cara mengakses hak tersebut.³³

Hak asasi perempuan adalah bagian dari HAM yang sudah diakui oleh dunia internasional. Pengakuan ini didasarkan pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang lahir pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis PBB pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR adalah awal dari pembukuan akan standar hak asasi manusia yang termasuk didalamnya juga diakui perihal hak asasi perempuan. UDHR telah menjadi tolok ukuran yang sifatnya umum untuk semua negara perihal HAM. Hak-hak persamaan, kebebasan dan keamanan pada masing-masing orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat seseorang, kebebasan berekspresi dan ikut serta dalam aktivitas politik dan juga mencari keadilan di depan hukum merupakan hak-hak yang dideklarasikan dalam UDHR.³⁴

Dalam novel *al-Karnak* ini, perempuan digambarkan sebagai makhluk patuh yang dengan setia menerima peran-peran tradisional mereka. Perempuan juga selalu hidup dalam rangkaian tuntutan dan ekspektasi serta terbelenggu dalam lingkaran feminitas. Dalam novel ini sosok Zainab mengalami kegagalan dalam hubungan cinta dan terjerumus dalam pelacuran, hal ini terlihat ketika dirinya menggoda dan menyerahkan tubuhnya pada Ismā'īl, meskipun Zainab merupakan tokoh yang terpelajar.

Perempuan pada masa Jahiliyah sempat mendapatkan perlakuan yang sangat jauh dari batas kewajaran. Adanya pemerkosaan, kekerasan nafsu laki-laki, perempuan sebagai simpanan laki-laki dan lain sebagainya. Namun, setelah Islam datang, posisi perempuan sudah berada pada posisi yang jauh lebih manusiawi.³⁵ Meskipun budaya patriarki masih ada, tapi sedikit demi sedikit mulai terkikis seiring perkembangan zaman. Perempuan mulai berani mengekspresikan berbagai pendapat dalam ruang publik. Apa yang direpresentasikan dalam novel *al-Karnak* masih ditemukan bahwa perempuan mengalami keterbatasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, sehingga ia mengalami kekerasan seksual akibat kebiasaannya berdiskusi di kafe Karnak tersebut.

Hal ini sebagaimana dengan misi Islam, yaitu pembebasan manusia (baik laki-laki maupun perempuan) dari segala bentuk anarki dan represif. Islam sangat menekankan kesetaraan di semua aspek kehidupan, termasuk kebebasan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an juga ditegaskan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk berusaha membebaskan golongan masyarakat tertindas. Begitu juga Rasulullah yang mengajarkan adanya kesetaraan gender, karena sejatinya antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhannya, yaitu sebagai seorang hamba. Budaya patriarki tidak diajarkan dalam agama Islam, Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah seorang laki-laki.³⁶ Artinya, baik

³³Julie A Mertus dkk, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah* (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi (Perempuan) Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK): Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 13.

³⁴ Afriandi, *Analisis Kepatuhan Mesir terhadap Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Pasca Revolusi Mesir 2011* (Padang: Universitas Andalas, 2019), h. 2.

³⁵ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, h. 56

³⁶ Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*. Jurnal SAWWA, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017, h. 418-420.

laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, yaitu sama-sama memiliki kebebasan dalam ruang publik, terutama kebebasan dalam mengungkapkan pendapat di depan khalayak publik.

Pembungkaman Pada Rakyat Yang Tidak Sependapat dengan Pemerintah

Salah satu problematika sosial yang sering kali terjadi pada suatu masyarakat bahkan dalam suatu negara adalah pembungkaman terhadap warga yang tidak sependapat dengan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya problematika kebebasan ruang publik. Pembungkaman merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang dapat merugikan satu atau sekelompok pihak karena tidak sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam masyarakat.³⁷ Pembungkaman merupakan perbuatan yang disengaja yang tentunya melanggar tindakan hukum pidana. Dalam novel *al-Karnak* ini berbagai pembungkaman Maḥfūz gambarkan, sehingga berakibat pada adanya penindasan baik secara fisik maupun psikologis, bahkan pembunuhan juga terjadi di dalam cerita tersebut. Sebagaimana teks berikut:

ويوما قال طه الغريب: سمعت عن أبناء اعتقالات واسعة.
وضح الحق، قد أرادوا اعتقال المتهمين فساقوا أصدقاءهم معهم حتى يتم
التحقيق.³⁸

Pada suatu hari, Ṭaha al-Gharīb membuka suara. “Aku dengar ada penangkapan besar-besaran.”

“Sudah jelas apa yang terjadi,” Muhammad Bahjat menambahkan. “Penguasa mengambil kebijakan memasukkan orang-orang yang mereka anggap bersalah ke penjara, sehingga mereka juga dapat menyeret teman-teman mereka. Dengan cara seperti itu, penyelidikan akan semakin lengkap.”

Dari teks di atas, para pemuda aktivis yang selalu menghabiskan hari-harinya di kafe Karnak untuk berdiskusi dan menyuarakan revolusi baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Setelah beberapa hari mencari informasi kemana perginya mereka, kemudian terdengar bahwa penguasa menangkap pemuda aktivis ini yang mereka anggap sebagai tokoh yang tidak setuju akan revolusi dan tuduhan bahwa mereka merupakan anggota Ikhwanul Muslimin, gerakan yang dianggap menyeleweng dari kebijakan pemerintah. Tokoh Ḥilmī Ḥamāda, Ismā‘īl al-Shāikh dan Zainab Diyāb merupakan korban dari penangkapan ini. Dimulai dari persahabatan yang sangat kuat antara Ḥilmī dengan Ismā‘īl, lalu Ismā‘īl menjalin hubungan asmara bersama Zainab menjadi tidak heran jika mereka bertigalah yang ditangkap oleh penguasa.

³⁷Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

³⁸Najīb Maḥfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 19.

Mereka ditangkap oleh polisi-polisi rahasia yang mana direktur dari polisi ini semua adalah Khālid Ṣafwān yang merupakan penguasa sangat kejam. Para polisi ini memasukkan mereka baik Ḥilmī, Ismā'īl dan Zainab ke dalam penjara yang kosong, lantainya sangat dingin dan gelap gulita seakan-akan tidak ada lagi kehidupan walaupun hanya secuil membuat Ismā'īl terkena penyakit influenza. Para polisi ini tidak puas jika hanya memenjarakan mereka, mereka juga melakukan penyiksaan kepada Ḥilmī, Ismā'īl maupun Zainab. Sebagaimana pada teks berikut:

متى انضممت إلى الإخوان؟
فشرت في الإجابة قائلاً: ما انضممت.
ولكن الكلام انقطع، غصت في الأرض بطريقة مذهلة ثم ارتفعت الأرض
متحدية ضعفي بما يشبه السحر، وسرعان ما ذاب خالد صفوان في
الظلام. أخبرني حلمي حمادة فيما بعد أن مارداً يقف ورأني صفعني بقوة
فأغمى علي. إذن قد أغمى علي، ثم وجدتني في الظلام الذي أخذت منه
على الأسفلت.³⁹

“Jadi, lelaki itu kembali bertanya, ‘kapan kau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin?’

“Tidak pernah...,’ aku mencoba menjawab namun tidak pernah selesai. Aku mulai jatuh terkapar di atas lantai; disambut serangan yang datang bagai sihir. Khalid Safwan segera menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, Ḥilmī Ḥamāda bilang padaku bahwa seorang pengawal kejam berdiri di belakangku, memukulku dengan keras sampai aku pingsan. Sewaktu sadar, aku sudah berada kembali di tempat semula aku diambil mereka – di atas lantai aspal di dalam sel.”

Penyiksaan terhadap Ismā'īl disebabkan karena ia dituduh sebagai anggota Ikhwanul Muslimin lantaran jenggot yang ada di dagunya. Padahal jenggot itu tumbuh disebabkan oleh lamanya ia mendekap dalam penjara. Perlakuan ini sangat mengerikan dan tidak adil bagi Ismā'īl. Setelah diselidiki oleh para polisi rahasia, Ismā'īl hanya sebagai penyumbang dana pembangunan sebuah masjid, tetapi ia tak pernah berhubungan langsung dengan mereka. Tekanan dan siksaan terhadap Ismā'īl tidak berhenti hanya sampai situ saja, ia semakin mendapat tekanan ketika ia dituduh menghina revolusi, meskipun kenyataannya ia merupakan salah satu anak revolusi yang sangat setia. Penyiksaan ini tidak hanya terjadi pada Ismā'īl, tetapi juga pada Ḥilmī Ḥamāda, sebagaimana teks berikut:

"نظرت فرأيت مشهداً غريباً تعذر علي احتواؤه لأول وهلة كمن يرى
صورة سريالية، ثم تبين لي أن حلمي حمادة معلق من قدميه وهو صامت
ساكن، مغمى عليه أو ميتاً فتراجعت فنزعا أترنج وغمغمت."⁴⁰

³⁹Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 47.

⁴⁰Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 51.

“Aku melihat ke dalam. Apa yang aku lihat benar-benar aneh. Pada mulanya aku tidak bisa melihat secara jelas, hanya mirip lukisan surealis. Kemudian terlihat olehku Hilmī Ḥamāda telah digantung kakinya, diam tak bergerak: tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati.”

Dari teks di atas merepresentasikan bahwa Khālīd Ṣafwān dan para anggotanya sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan membuat Ismā‘īl sangat benci dan muak. Para pemuda aktivis ini dipaksa untuk bersabar bahkan menerima kondisi mereka, layaknya nyamuk, tanpa hak, kehormatan dan perlindungan.⁴¹ Mereka sangat takut terhadap para polisi rahasia karena menerapkan sensor-diri yang begitu ketat. Dalam novel ini tidak direpresentasikan sama sekali bentuk pemberontakan para pemuda tersebut, meskipun mereka hanyalah korban dari tuduhan otoriter penguasa. Hal ini merupakan ciri politik represif pemerintah sebagai lembaga yang berkuasa mengabaikan kepentingan masyarakat, menggunakan kekerasan tanpa kontrol guna menekan pihak yang tidak patuh.

Penyiksaan merupakan kejahatan yang sangat serius dan melakukannya merupakan sebuah kejahatan Internasional. Konvensi melarang penyiksaan dan perlakuan secara kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Larangan penyiksaan merupakan salah satu sarana HAM yang *urgent* karena konvensi ini mengatur hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yaitu hak bebas dari penyiksaan.⁴² Maka problematika yang terlihat dalam novel *al-Karnak* ini adanya ketidakbebasan rakyat dari penyiksaan penguasa secara kejam. Padahal sejatinya setiap individu berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kejahatan sosial yang direpresentasikan dalam novel *al-Karnak* tidak hanya dalam bentuk penindasan dan penyiksaan semata, lebih dari itu yaitu pembunuhan pada salah satu tokoh, sebagaimana teks berikut:

وحدثني عن مصرع حلمي حمادة فقال إنه مات في حجرة التحقيق. كانت به عصبية وجرأة، استفزتهم إجابة، تلقى صفعات فهاج غضبة وحاول أن يراد الاعتداء بمثله فانهاه عليه حارس باللكمات حتى أغمى عليه، ثم تبين أنه فارق الحياة.⁴³

‘Mereka bilang Hilmī meninggal di ruang interogasi. Ia tetap bersiteguh memegang keyakinan sekaligus pendiriannya. Jawaban yang ia berikan membuat mereka marah. Mereka memukulinya, dan dalam kemarahan, ia mencoba membalasnya. Pukulan bertubi-tubi tersebut berlangsung hingga ia pingsan dan meninggal.’

⁴¹Halim Barakat, *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara* (The Arab World: Society, Culture and State), diterjemahkan oleh Irfan M/Zakkie (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), h. 292.

⁴²Rommy Patra, *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018, h. 567.

⁴³Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 58.

Dari teks di atas merepresentasikan bahwa Ḥilmī Ḥamāda terbukti sebagai seorang komunis. Ia dihakimi dan disiksa secara kejam oleh para polisi rahasia di ruang interogasi. Pada saat interogasi ini berlangsung, Ḥilmī tetap pada pendiriannya dan bersikeras bahwa ia memang merupakan seorang komunis, hingga membuat penguasa tiran itu geram dan murka padanya dan pada akhirnya ia disiksa hingga mati. Ḥilmī terbunuh di atas tangan para polisi rahasia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dari sinilah semakin memunculkan persepsi bahwa dalam novel *al-Karnak* karya Najīb Maḥfūz ini seakan-akan Tuhan berpihak pada penguasa. Ia dapat melakukan apa saja sesuai keinginannya sendiri kepada para tokoh yang ada dalam cerita. Dalam cerita ini Tuhan tidak selalu hadir setiap waktu, tapi Ia memiliki kemampuan untuk menyuruh bawahannya melakukan apa saja yang ia kehendaki. Dalam novel ini sosok Tuhan tercermin pada diri Khālid Ṣafwān.

Apabila kita melihat kembali sejarah Mesir saat itu, gerakan Ikhwanul Muslimin pada masa pemerintahan Gamāl Abd al-Nāṣir, gerakan ini kadang-kadang juga disebut sebagai gerakan fundamentalis.⁴⁴ Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi yang berasas pada ideologi Islam dalam setiap gerakannya. Gerakan ini ikut serta mewarnai dinamika politik Mesir sejak awal berdirinya tahun 1928 hingga masa pemerintahan selanjutnya. Organisasi Ikhwanul Muslimin ini mempunyai tujuan untuk menyerukan dalam pendirian negara Islam Mesir, dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Mesir beragama Islam dan juga anggapan mereka bahwa selama ini pemerintah selalu memisahkan urusan agama dengan urusan politik. Walaupun pada saat itu Islam sudah dicantumkan pada konstitusi Mesir, tetapi belum membuat Ikhwan merasa puas.

Pada awalnya pemerintah memuji gerakan ini karena memiliki cita-cita yang sama yaitu menghilangkan kolonialisme dalam negara. Akan tetapi tidak lama kemudian, gerakan ini dianggap sebagai organisasi yang menyeleweng dari harapan pemerintah dan semakin memanas ketika adanya tuduhan atas Ikhwanul Muslimin usaha pembunuhan terhadap presiden Nāṣir pada tahun 1954. Hal inilah yang dapat memberikan alasan pada pemerintah untuk membubarkan gerakan ini. Ribuan anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap, dipenjara bahkan diantaranya dihukum mati.⁴⁵ Sejarah inilah yang menyebabkan Ḥilmī Ḥamāda dihukum mati oleh para penguasa karena dirinya merupakan seorang anggota Ikhwanul Muslimin. Apa yang dialami Ḥilmī Ḥamāda ini merupakan gambaran adanya eksploitasi hak asasi kebebasannya berupa hak untuk hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa lahirnya HAM dilandasi karena dua hak paling pokok yaitu persamaan dan kebebasan.

Krisis Kepercayaan Rakyat Terhadap Pemerintah

Keamanan negara yang lemah biasanya disebabkan karena adanya pengabaian pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Secara umum, kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang selaras dengan masyarakat, adapun jika didapati minimnya tingkat kesejahteraan maka secara tidak langsung hal ini akan menjadi salah satu jalan masyarakat dalam menyuarakan hak-hak yang harus diberikan dengan melakukan protes serta upaya demonstrasi. Namun jika didapati pemerintah yang otoriter

⁴⁴Khoiruddin Nasution, *Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam di Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-Muslimun*. Jurnal UNISIA, No. 41/XXII/IV/2000, h. 312.

⁴⁵Mohtar Dwi Purnomo, *Pandangan Dunia dalam Novel al-Karnak Karya Najib Mahfud: Analisis Strukturalisme Genetik Lucian Goldman* (Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 74.

dengan kebijakannya, maka rakyat dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat ur represif negara mereka sendiri.

Keterbatasan daya dan posisi antara pemerintah dan rakyat inilah yang memunculkan adanya sikap pemerintah yang represif. Sebagaimana novel *al-Karnak* ini yang menceritakan bermacam problematika di tengah politik yang represif. Tokoh-tokoh dalam novel ini terpaksa bersabar atau bahkan menerima kondisi tanpa hak, perlindungan dan kehormatan. Kondisi internal dan eksternal rakyat yang tidak harmonis karena dihadapkan pada tekanan hebat sehingga seolah-olah mampu menyesuaikan diri dengan tatanan sosialnya yang sangat tidak aman dan nyaman ini. Dalam novel ini sangatlah terlihat dampak dari posisi pemerintah yang otoriter dengan kebijakannya sehingga berdampak pada mental rakyat sebagai berikut:

وعجبت لحال وطني. إنه رغم انحرافه يتضخم ويتعظم ويتعمق، يملك القوة والنفوذ، يصنع الأشياء من الإبرة حتى الصاروخ، يبشر باتجاه إنساني عظيم، ولكن ما بال الإنسان فيه قد تضائل وتهافت حتى صار في تهافة بعوضة، ما باله يمضي بلا حقوق ولا كراهة ولا حماية، ما باله ينهكه الجبن والنفاق والخواء.⁴⁶

Aku benar-benar dibuat heran oleh negara ini, tempat tanah airku berada. Sekalipun banyak kesalahan terjadi, namun ia tetap tumbuh dengan kuat dan berwibawa, selalu berkembang dan terus membesar. Negara ini juga menghasilkan barang-barang berkualitas, dari benda kecil seperti jarum hingga roket, menaburkan kebaikan-kebaikan baru dan tren manusiawi dalam kehidupan yang humanis. Tapi apalah arti semua itu jika rakyat menjadi sangat lemah dan tertindas, mereka tidak lebih berharga dari seekor lalat, tidak memiliki hak pribadi, tidak punya kehormatan, tak ada rasa aman, dan selalu dihantui rasa takut.

وفقدنا الكثير من شجاعتنا، وثقتنا في أنفسنا وفي الأيام، واكتشفنا وجود قوة مخيفة تعمل في استقلال كلي عن القانون والقيم الإنسانية.⁴⁷

“Lambat laun kami banyak kehilangan keberanian, rasa percaya diri, sekaligus keyakinan. Kami kini telah menemukan adanya kekuatan mengerikan yang bergerak jauh dari aturan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan.”

Dari kutipan teks di atas memberikan gambaran bahwa tidak adanya peran dan kontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Padahal seharusnya seorang pemimpin mampu mengayomi setiap rakyatnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Namun demikian, dalam praktiknya sebagaimana dalam novel ini masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Mesir yang pada saat itu sudah mulai mengusung asas demokrasi. Akibat sistem negara yang cenderung otoriter

⁴⁶Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 26.

⁴⁷Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 64.

dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat inilah masyarakat Mesir hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Di dalam struktur novel *al-Karnak* ini digambarkan juga bahwa Tuhan seperti penguasa. Tuhan dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya pada semua tokoh yang dihadirkan dalam novel. Akan tetapi, Tuhan tidak selalu hadir pada setiap tragedi, ia mempunyai kekuatan untuk memerintah bawahannya guna melakukan apa yang ia inginkan.

Tuhan dalam novel ini tergambar pada tokoh Khālid Ṣafwān yang merupakan direktur biro polisi rahasia. Ia memiliki banyak bawahan, yaitu para polisi rahasia lainnya. Apa pun yang tidak sesuai dengan ideologi Ṣafwān, ditangkap dan dihukum, sehingga dalam menjalani dinamika kehidupan, rakyat berada dalam mata-mata para polisi rahasia yang hampir 24 jam berada di sekitar mereka. Kekejaman dan bayang-bayang tanpa wujud inilah yang mengancam keamanan rakyat. Keamanan secara sederhana dapat dipahami sebagai suasana bebas dari segala ancaman bahaya, kecemasan, ketakutan bahkan adanya ancaman fisik. Maka, segala bentuk eksploitasi yang dialami para tokoh dalam novel *al-Karnak* ini merepresentasikan bahwa para tokoh mengalami ketidakbebasan dari ancaman ketakutan dalam menjalani hidup dan serangan fisik. Adanya biro polisi rahasia sebagaimana teks di bawah ini:

نحن في زمن القوى المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح النهار، وجعلت أتخيل
وأ تذكر.⁴⁸

Maksudnya:

“Kita semua memang berada dalam sebuah era di saat pelbagai kekuatan tanpa wujud tengah berkuasa – banyak mata-mata bersiaga menanti setiap tarikan nafas kita, bagai bayang-bayang yang senantiasa mengikuti kita manakala berjalan di siang hari.”

Teks di atas merepresentasikan bahwa seluruh rakyat hidup dalam kekhawatiran karena selalu dikelilingi oleh para polisi rahasia, bahkan tokoh Ismā‘īl al-Shaīkh dan Zainab Diyāb yang merupakan korban dari kekejaman pemerintah otoriter ini juga pada akhirnya menerima pekerjaan untuk bergabung bersama mereka dan menjadi mata-mata. Inilah alasan, mengapa Ismā‘īl dibebaskan dari penjara dan siksaan. Ia menjadi informan dengan gaji cukup, namun dengan nurani yang tersiksa.⁴⁹ Seberapa pun ia gigih berjuang melawan nuraninya untuk menerima pekerjaan barunya tersebut lantaran ikatan yang kuat dengan revolusi, namun ujungnya adalah rasa berdosa atas apa yang ia lakukan.

Ketika Ismā‘īl menjadi mata-mata, diluar prediksi ternyata Ḥilmī mengaku bahwa dirinya seorang komunis, pada saat ini Ismā‘īl merasa tertampar. Namun, karena persahabatan yang terjalin antara keduanya membuat Ismā‘īl untuk menahan diri dan tidak melaporkan pada Safwan. Hal ini membuat Ṣafwān geram, lantas Ismā‘īl diberi cambukan seratus kali dan dimasukkan kembali ke dalam sel, sebuah ruang kelam yang abadi. Melihat Ismā‘īl sang kekasih disiksa, Zainab memutuskan untuk bergabung menjadi mata-mata Ḥilmī. Jadi, Zainab adalah orang yang membuka rahasia Ḥilmī kepada Safwan dengan tujuan menghindarkan Ismā‘īl dari penderitaan besar.

⁴⁸Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 21.

⁴⁹Najīb Mahfūz, *Al-Karnak* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1974), h. 89.

Problematika ini secara tidak langsung menunjukkan peran pemerintah pada masa itu sangat jauh dari tingkat kepedulian secara perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu secara tidak langsung menyebabkan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berujung kepada munculnya mata-mata pemerintah dalam menghilangkan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah pada waktu itu.

PENUTUP

Berdasarkan analisis pada novel *al-Karnak* karya Najīb Maḥfūz, penulis mendapatkan kesimpulan utama bahwa Najīb Maḥfūz terkenal sebagai sastrawan yang sangat komitmen membahas berbagai persoalan sosial dan politik di negaranya yaitu Mesir. Melalui karya-karyanya, Maḥfūz ingin merepresentasikan kepada khalayak pembaca bagaimana Mesir dipimpin oleh para pemimpin yang tiran, kejam serta otoriter. Maka, tidak heran apabila problematika politik sangat kental bahwa mewarnai setiap lini kehidupan masyarakat Mesir saat itu, terlebih pasca terjadinya Perang Enam Hari pada tahun 1967 M. Peneliti mendapatkan beberapa potret eksploitasi kebebasan ruang publik yang tertuang dalam novel *al-Karnak* karya Najīb Maḥfūz. Pertama, Eksploitasi kebebasan dalam wujud keterbatasan perempuan dalam menyampaikan pendapat. Zainab sebagai aktivis muda yang dianggap komunis dalam novel ini direpresentasikan sebagai tokoh yang mendapatkan kekejaman dari direktur polisi rahasia bernama Khālīd Ṣafwān yakni mendapatkan serangan seksual dan dipertontonkan di depan khalayak umum. Kedua, pembungkaman terhadap warga yang tidak sependapat dengan pemerintah, adapun dalam novel *al-Karnak* ini berbagai kejahatan sosial Maḥfūz gambarkan, seperti mata-mata, penangkapan secara tiba-tiba tanpa melalui proses hukum, penindasan baik secara fisik maupun psikologis, penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap tokoh Ḥilmī Ḥamāda. Ketiga, problematika kebebasan dalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam novel direpresentasikan bahwa tidak adanya peran dan kontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Akibat sistem negara yang tidak mampu menyejahterakan rakyat, masyarakat Mesir hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Maka, segala bentuk eksploitasi yang dialami para tokoh dalam novel *al-Karnak* ini merepresentasikan bahwa para tokoh mengalami ketidakbebasan dari ancaman ketakutan dalam menjalani hidup dan serangan fisik di negaranya sendiri yang mana hal ini sama sekali tidak selaras dengan ungkapan Jurgen Habermas bahwa masyarakat bebas dalam mengemukakan pendapat di hadapan publik tanpa memandang laki-laki maupun perempuan demi mendapatkan kehidupan yang layak di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi. *Analisis Kepatuhan Mesir terhadap Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Pasca Revolusi Mesir 2011*. Padang: Universitas Andalas, 2019.
- Arditama, Erisandi. 2011. *Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik melalui Dominasi Budaya; Politik Indonesia*. *Indonesian Political Science Review*, 1.1 (2016). <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.
- Barakat, Halim. *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara (The Arab World: Society, Culture and State)*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Berg, Bruce L. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. United State of America: Pearson Education, 2001.
- Brunner, Otto et.al. (ed). *Geschichtliche Grundegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen in Deutshland*. Klett-Cotta: Stuttgart, 1978.
- Calhoun, Craig. *The Facets of the Public Sphere: Dewey, Arendt, Habermas*, in *Institutional Change in the Public Sphere*, ed. by Fredrik Engelstad and Others (De Gruyter), 2017.
- Faruk. *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Al-Ghīṭāny, Jamāl. *Najīb Maḥfūz Yaʿadzākkār*. Beirut: Dār al-Māsīrah, 1980.
- Habermas, Jurgen. *The Struktural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press, 1989.

Amiroh Nichayatun Munir Azizah, Sukron Kamil
Literature As A Representation Of The Problems Of Freedom In Public Space: A Study Of Najib Mahfuz's Novel Al-Karnak

Hardiman, Budi (ed). *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

Hasanah, Ulfatun dan Najahan Musyafak, *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*. Jurnal SAWWA, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017.

Henriques, Embu and Andina Dwifatma. *Fungsi Politik Ruang Publik Pada Masa Orde Baru, Reformasi, Hingga Era Digital*, Jurnal Interact, vol. 4, No.1 (2015)
<http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/fiabikom/article/view/726>.

Hitti, Philip K. *Sejarah Ringkas Dunia Arab*. Yogyakarta: Iqra' Pustaka, 2001.

Jamilah, Maryam. *Ketidaksetaraan Gender Perempuan Mesir di Bidang Politik Pasca Arab Spring 2011*. Jurnal Buana Gender, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017.

Kamil, Sukron. *Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Kasim, Nur Mohammad. *Keterlibatan Perempuan dalam Dinamika Hukum di Indonesia*. Jurnal MUSAWA, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.

Kiftiyah, Anifatul. *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Mahfuz, Najib. *Al-Karnak*. Kairo: Dar al-Shurūq, 1974.

Melkonian, Harry. *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression*. New York: Cambria Press, 2012.

Mertus, Julie A dkk. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah* (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi (Perempuan) Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK): Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam di Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-Muslimun*. Jurnal UNISIA, No. 41/XXII/IV/2000.

Patra, Rommy. *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018.

Purnomo, Mochtar Dwi. 2016. *Pandangan Dunia dalam Novel al-Karnak Karya Najib Mahfudz: Analisis Strukturalisme Genetik*. Yogyakarta: Tesis Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

- Rachmatullah. *Kritik atas Monarki Islam: Kajian Novel Hatif min Al-Andalus karya Ali Jarim (studi Sosiologi Sastra)*. Jakarta: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Satoto, Soediro dan Zainuddin Fanani (Ed). *Sastra: Ideologi, Politik dan Kekuasaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Siswantoro. *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suweleh, Fadlun. *Karakteristik Heterotopia Ruang Kafe dalam Novel al-Karnak Karya Najib Mahfudz: Analisis Other Space Michel Foucault*. Yogyakarta: Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Syi'aruddin, Mohammad Anwar. *Sastra Islam dan Modernitas dalam Novel Api Tauhid el-Shirazy*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2016.
- Taum, Yoseph Yapi. *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2015.
- Taymur, Mahmud. *Ittijaahaat al-Adab fii al-Siniin al-Mi'ah al-Akhirah*. Kairo: al-Namudzajiyah, 1970.
- Wijaya, Sri. *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*. AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1, April 2016.
- Zulfiani, Dini dkk. *Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Administrative Reform, Vol. 6, No. 3, September 2018.